

## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2009-2013)

### *THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, LOCAL REVENUES AND A GENERAL ALLOCATION OF FUNDS FOR CAPITAL EXPENDITURE BUDGET ALLOCATION*

*(Case Study in Local Government of the Bogor City for Year 2009-2013)*

Maryam Nur Fajrina<sup>1</sup>, Leny Suzan, SE.,M.Si.<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom  
[marvamfajrina@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:marvamfajrina@student.telkomuniversity.ac.id)<sup>1</sup>, [Lenysuzan@telkomuniversity.ac.id](mailto:Lenysuzan@telkomuniversity.ac.id)<sup>2</sup>

#### Abstrak

Kontribusi Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum pada Kota Bogor Tahun 2009-2013 mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor masih bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2009-2013. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar 98,4% dan secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara positif terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci** : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

#### Abstract

*Contributions Fund Balance in particular the General Allocation Fund in Bogor City Year 2009-2013 has a greater contribution than the regional revenue. This indicates that the Bogor City Government is still dependent on central government. Local governments need to optimize revenue sources are sourced from regional revenue. This study aims to identify and analyze the influence of Economic Growth, Local Revenue and the General Allocation Fund for Capital Expenditure in Bogor City Government budget year 2009-2013. Data analysis method used is multiple linear regression analysis. Results of this study indicate that there are significant simultaneously Economic Growth, Local Revenue and the General Allocation Fund for Capital Expenditure amount to 98.4% and partially Growth no significant impact positively on Capital Expenditure, regional revenue negatively significant effect on Shopping Capital and General Allocation Fund significant influence positively on Capital Expenditure.*

**Keyword** : Economic Growth, Local Revenue, General Allocatin of Funds, Capital Expenditure

#### 1. Pendahuluan

Bogor sebagai salah satu kota di Jawa Barat telah merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah khususnya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berlandaskan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi belanja modal daerah. Sumber-sumber pendanaan lain adalah dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan yang menjadi penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan

mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya ( Julitawati, et al., 2012 ).

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor yang semakin tahun semakin menunjukkan pertumbuhannya menandakan adanya perkembangan kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan jasa, maupun perdagangan serta banyaknya pembangunan-pembangunan seperti tempat wisata, restoran dan hotel di Kota Bogor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bogor, struktur ekonomi Kota Bogor banyak didominasi oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 35,76% dan Sektor Industri Pengelolaan sebesar 27,48% yang membuat Kota Bogor sangat menarik bagi para investor.

**Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2009-2013**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	Pendapatan Asli Daerah	%	DanaAlokasi Umum	%	Belanja Modal	%
2009	4.508.705,07	-	102,447,491,431	-	439,253,840,000	-	123,024,139,100	-
2010	4.785.434,36	6.13%	125,766,337,107	18.54%	426,093,607,000	-3.09%	156,117,147,141	26.90%
2011	5.081.482,69	6.75%	200,433,711,496	37.25%	472,888,388,000	9.90%	164,191,039,370	5.17%
2012	5.394.303,88	6.15%	252,280,722,686	20.55%	603,531,550,000	21.65%	324,453,173,562	99.43%
2013	5.710.336,54	5,85%	400,676,068,667	37.04%	686,520759,000	12.09%	395,250,675,810	20.70%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor (data diolah)

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010; dalam Wertianti dan Dwirandra, 2013). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun (Wertianti dan Dwirandra, 2013). Menurut Uhise (2013) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestis Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Salah satu indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi yang bias dilihat dari Pertumbuhan nilai PDRB. Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada Tabel 1 yang menyajikan informasi jumlah dan presentase perubahan Pertumbuhan Ekonomi pada Kota Bogor. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,85%, hal ini dikarenakan jumlah kenaikan PDRB tidak sebesar tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 6.75%. Untuk tahun 2012 ke tahun 2013, terjadi penurunan persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%, walaupun persentase peningkatan yang didapat sangat kecil namun secara keseluruhan total pertumbuhan ekonomi Kota Bogor mengalami peningkatan dari setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dalam satu tahun anggaran.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Dapat di lihat pada Tabel 1 yang menyajikan informasi jumlah dan persentase perubahan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bogor. Pada tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 18.54% disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan peningkatan sebesar 37.25% disebabkan adanya kenaikan pada komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Pajak Daerah. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 persentase peningkatan mengalami penurunan yaitu sebesar 20.55%, namun secara keseluruhan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada semua komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk tahun 2012 ke tahun 2013 persentase peningkatan kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 37.04%. peningkatan terjadi pada seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga seiring meningkatnya jumlah dari komponen tersebut akan meningkat pula jumlah pada Pendapatan Asli Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Penerimaan Dana Alokasi Umum dari tahun 2009 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1. Jumlah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2009 ke tahun 2010, terjadi perubahan penurunan sebesar 3.09%. Pada tahun 2010 ke tahun 2012 terjadi perubahan peningkatan sebesar 9.90%, pada tahun 2011 ke tahun 2012 peningkatan persentase mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 21.65%, sedangkan untuk tahun 2012 ke tahun 2013 Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar 12.09%. Namun secara umum terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum pada tahun 2011 hingga 2013.

Menurut Tanjung (2012:90), Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam PSAP BA 02 paragraf 37 dijelaskan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada Tabel 4.5 yang menyajikan informasi jumlah dan persentase perubahan persentase Belanja Modal pada Kota Bogor.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada tahun 2009-2013 pada Kota Bogor, dan bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal secara simultan dan parsial. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal secara simultan dan parsial pada Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2009-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, teknik analisis regresi berganda, uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parsial.

## **2. Dasar Teori dan Metodologi**

### **2.1 Dasar Teori**

#### **2.1.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Menurut Ardhani (2011) Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawan pemerintah daerah kepada masyarakatnya adalah memberikan pelayanan publik yang baik melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah di anggarkan setiap tahunnya. Dengan demikian, adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Yaitu bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pengalokasian belanja modal juga meningkat.

#### **2.1.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan daerah untuk menyediaka sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada realisasi potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modal pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah (Yovita, 2011). Bentuk layanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan menyediakan saran dan prasarana, pengadaan tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal. Dengan demikian terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pegalokasian belanja modal.

#### **2.1.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Permana (2013), pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum.

## 2.2 Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013. Teknik sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:85). Dalam melakukan pengolahan data, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana

- Y = Belanja Modal  
 X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Ekonomi  
 X<sub>2</sub> = Pendapatan Asli Daerah  
 X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Umum  
 a = konstanta  
 b<sub>1</sub>b<sub>2</sub> b<sub>3</sub> = koefisien regresi  
 e = variabel pengganggu

## 3. Pembahasan

### 3.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif ditujukan untuk mengetahui berapa jumlah tertinggi, terendah dan rata-rata dari masing-masing variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 2 Statistik Deskriptif**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PertumbuhanEkonomi	30	376,587,525,000.00	488,010,417,000.00	430,879,160,500.00	36,683,943,476.935
PendapatanAsliDaerah	30	8,355,771,510.31	41,413,523,248.36	19,721,262,090.20	10,509,129,544.345
DanaAlokasiUmum	30	35,274,913,738.40	59,216,936,707.30	44,756,372,081.25	9,371,239,736.428
BelanjaModal	30	10,494,812,655.30	33,442,440,963.40	20,631,640,182.16	9,266,131,029.192
Valid N (listwise)	30				

Sumber: *Output SPSS 20 (2015)*

Penjelasan masing-masing variabel berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif tersaji dalam penjelasan berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2009-2014

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 2 diperoleh informasi bahwa jumlah PDRB terendah sebesar Rp 376,587,525,000.00 terjadi pada bulan Juli tahun 2009, sedangkan PDRB tertinggi sebesar Rp 488,010,417,000.00 terjadi pada bulan Desember 2013. Data tersebut disajikan pada Gambar 4.1. Rata-rata PDRB dari tahun 2009 hingga tahun 2013 yaitu sebesar Rp 430,879,160,500.00. Standar Deviasi yang diperoleh sebesar Rp 36,683,943,476.935 yang menandakan bahwa data PDRB mengelompok atau tidak bervariasi.

**Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto**

Tahun	Jumlah	Persentase Perubahan
2009	4.508.705,07	-
2010	4.785.434,36	6.13%
2011	5.081.482,69	6.75%
2012	5.394.303,88	6.15%
2013	5.710.336,54	5.85%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor(2015)

b. Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2009-2013



Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 2 diperoleh informasi bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar Rp 8,355,771,510.31 terjadi pada bulan Juli tahun 2009 disebabkan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dibandingkan pada bulan sebelumnya yaitu bulan Juni tahun 2009. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi sebesar Rp 41,413,523,248.36 pada bulan Desember 2013. Rata – rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar Rp 19,721,262,090.20 dan standar deviasi sebesar Rp 10,509,129,544.345 yang menandakan bahwa data Pendapatan Asli Daerah mengelompok atau tidak bervariasi.

**Tabel 4 Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Jumlah	Persentase Perubahan
2009	102,447,491,431	-
2010	125,766,337,107	18.54%
2011	200,433,711,496	37.25%
2012	252,280,722,686	20.55%
2013	400,676,068,667	37.04%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor(2015)

c. Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2009-2013

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 2 diperoleh informasi bahwa jumlah Dana Alokasi Umum terendah sebesar Rp 35,274,913,738.40 pada bulan Desember 2009. Sedangkan Dana Alokasi Umum tertinggi sebesar Rp 59,216,936,707.30 pada bulan Desember 2013. Data disajikan pada Gambar 4.3. Rata-rata penerimaan Dana Alokasi Umum pada tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar Rp 44,756,372,081.25 dan standar deviasi yang diperoleh sebesar Rp 9,371,239,736.428 yang menandakan bahwa data Dana Alokasi Umum mengelompok atau tidak bervariasi.

**Tabel 5 Dana Alokasi Umum**

Tahun	Jumlah	Persentase Perubahan
2009	439,253,840,000	-
2010	426,093,607,000	-3.09%
2011	472,888,388,000	9.90%
2012	603,531,550,000	21.65%
2013	686,520,759,000	12.09%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor(2015)

d. Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2009-2013

Berdasarkan uji statistik deskriptif diperoleh informasi bahwa jumlah Belanja Modal terendah sebesar Rp 10,494,812,655.30 terjadi pada bulan Juli 2009. Sedangkan Belanja Modal tertinggi sebesar Rp 33,442,440,963.40 terjadi pada bulan Desember 2013. Rata-rata pengeluaran Belanja Modal sebesar Rp 20,631,640,182.16 dan standar deviasi yang diperoleh sebesar Rp 9,266,131,092.192 yang menandakan bahwa data Belanja Modal mengelompok atau tidak bervariasi.

**Tabel 6 Belanja Modal**

Tahun	Jumlah	Persentase Perubahan
2009	123,024,139,100	-
2010	156,117,147,141	26.90%
2011	164,191,039,370	5.17%
2012	324,453,173,562	99.43%
2013	395,250,675,810	20.70%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor(2015)

Menurut Sanusi (2011:135) regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias. Berikut hasil uji asumsi klasik:

- Uji Normalitas
- Besarnya nilai Kolmogrov Smirnov sebesar 0.916 dengan tingkat signifikansi 0,371. Tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Sehingga  $0,371 > 0,05$ , artinya data berdistribusi normal.
- Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji yang dilakukan dengan menggunakan grafik Scatter plot, dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

d. Uji autokorelasi

Berdasarkan uji yang dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Watson (d)*, angka Durbin-Watson sebesar 0.355 sehingga tidak terjadi autokorelasi karena angka Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2. Model regresi yang baik adalah jika bebas dari autokorelasi.

e. Uji multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  $r^2$  lebih kecil dibandingkan nilai  $R^2$  pada tabel utama. Ini membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel independen.

**Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	-43799584383.335	8603938830.328		-5.091	.000
PertumbuhanEkonomi	.045	.027	.178	1.696	.102
PendapatanAsliDaerah	-.315	.085	-.357	-3.703	.001
DanaAlokasiUmum	1.146	.093	1.159	12.381	.000

a. Dependent Variable: BelanjaModal

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = - 43,799,584,383.335 + 0.45X_1 - 0.315X_2 + 1.146X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Belanja Modal  
 $X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi  
 $X_2$  = Pendapatan Asli Daerah  
 $X_3$  = Dana Alokasi Umum

E = Error

Dari model regresi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta yang diperoleh adalah -43,799,584,383.335 menyatakan bahwa apabila variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum bernilai nol, diasumsikan jumlah pengalokasian Belanja Modal -43,799,584,383.335.
2. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi bernilai positif 0.45 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pertumbuhan Ekonomi maka diperkirakan pengalokasian Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.45 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bernilai negatif -0.315 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah maka diperkirakan pengalokasian Belanja Modal akan menurun sebesar -0.315 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.
4. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum bernilai positif 1.146 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Dana Alokasi Umum maka diperkirakan pengalokasian Belanja Modal akan meningkat sebesar 1.146 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.

Uji hipotesis terdiri dari Koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Berikut hasil pengujian hipotesis:

a. Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi nilai adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,984. Nilai ini menyatakan bahwa sebesar 98,4% perubahan Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor dipengaruhi oleh besarnya Pertumbuhan Ekonomi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan Dana Alokasi Umum yang diperoleh, sedangkan sisanya sebesar 1,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

b. Uji signifikansi simultan (uji statistik F)

Berdasarkan uji signifikansi simultan menghasilkan bahwa nilai F hitung sebesar 584.264 dengan tingkat signifikansi 0,000. Adapun nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas pembilang (df1) sebesar  $k = 3$  dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar  $= 26$  adalah sebesar 2.98. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari F tabel. Jika dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan demikian dapat disimpulkan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal.

c. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Hasil uji statistik t dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- Dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar  $0,102 > 0,05$  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
- Dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar  $0,001 < 0,05$  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal namun dengan arah negatif.
- Dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara positif terhadap Belanja Modal.

### 3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara simultan

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terhadap Belanja Modal diperoleh angka F hitung  $> F$  tabel yaitu  $584.264 > 2.98$ . Dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dapat diartikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal secara simultan. Peningkatan atau penurunan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis yang pertama yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2009-2013. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian I G A Gede Wertianti dan A.A.N.B Dwirandra (2013) menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

#### a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara parsial

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal, diperoleh nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $1.696 > 2.5553$ . Dengan tingkat signifikansi  $0,102 > 0,05$  tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0.045 seperti yang tersaji dalam tabel 7 hasil uji t. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Namun dengan tingkat signifikansi  $0,102 > 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar satu satuan, maka diperkirakan Belanja Modal tidak akan ikut meningkat. Hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis yang kedua yaitu Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap pengalokasian Belanja Modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian Askam Tuasikal (2011) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal secara parsial.

#### b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, diperoleh nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $-3.703 < 2,00247$ . Dengan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$  tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar -0.315 seperti yang tersaji dalam Tabel 7 hasil uji t. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif terhadap Belanja Modal. Artinya setiap kenaikan satu satuan akan mengakibatkan penurunan Belanja Modal sebesar 3.703 sedangkan variabel lain dianggap konstan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang ketiga yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal secara parsial. Hubungan yang berlawanan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berarti setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan penurunan

Belanja Modal sebesar 3.0703. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Lingga Swastika (2013) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal.

**c. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, diperoleh nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $12.381 > 2,00247$ . Dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 1.146 seperti yang tersaji dalam Tabel 7 hasil uji  $t$ . Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis yang keempat yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap pengalokasian Belanja Modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian I G A Gede Wertianti dan A.A.N.B Dwirandra (2013) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal secara parsial.

**d. Kesimpulan**

**a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami kenaikan dari setiap tahunnya untuk tahun anggaran 2009-2013.
2. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
3.
  - a. Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Belanja Modal.
  - b. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Belanja Modal.
  - c. Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara positif terhadap Belanja Modal.

**Daftar Pustaka**

- [1] Ardhani, Pungky (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.* , Vol. 1 No. 2 Juli 2008. Hal. 142-155.
- [2] Julitawati, E., Darwanis, dan Jalaluddin. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.* Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1, Agustus 2012, ISSN 2302-0164.
- [3] Permana, Deva Yoga (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Naskah Publikasi. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- [4] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. [ 21 Januari 2015].
- [5] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. [21 Januari 2015].
- [6] Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta : Salemba Empat.
- [7] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung : Alfabeta.
- [8] Swastika, Lingga. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Boyolali.* Naskah Publikasi. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
- [9] Tanjung, Abdul hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.* Bandung: Alfabeta.
- [10] Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.* Jurnal, Vol. 1 No. 2 Juli 2008. Hal. 142-155.
- [11] Uhise, Stepvani. (2013). *Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.* Jurnal EMBA, Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1677-1686.
- [12] Wertianti, I G A Gede., dan Dwirandra. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556.